

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar di SDN Sukabumi 1 dari aspek komunikasi kebijakan, PIP dikomunikasikan pada *event-event* tertentu dengan mengundang kepala sekolah bukan pengelola PIP secara langsung, sekolah mengkomunikasikan PIP secara lisan ke peserta didik. Sekolah memberitahu syarat-syarat yang harus dikumpulkan untuk pengusulan. Dari aspek sumberdaya peralatan, sumberdaya peralatan sudah cukup dan membatu dalam pelaksanaan PIP antara lain komputer dan wifi. Pengelola PIP di SDN Sukabumi 1 yaitu operator sekolah. Dari segi modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbatas dalam anggaran untuk melaksanakan sosialisasi PIP. Informasi yang diberikan mengenai pengusulandan pencairan dana sudah jelas.
2. Faktor pendukung pelaksanaan PIP adalah adanya dukungan dari orangtua berupa orangtua lapor ke sekolah kalau mempunyai KIP, dengan admin dan bendahara sekolah, adanya koordinasi

antara pengelola di tingkat pusat, daerah dan sekolah, fasilitas yang disediakan sekolah sudah memadai, dan informasi yang jelas. Faktor penghambat pelaksanaan PIP kurangnya komunikasi antara lembaga penyalur dengan sekolah terkait pengambilan dana, kurangnya anggaran untuk sosialisasi PIP, dan akurasi data.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saran yang diberikan terkait implementasi PIP melalui KIP adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

- a. Jalur pengusulan PIP cukup melalui satuan pendidikan baik formal/non formal, bila melalui kelompok kepentingan hendaknya ada kriteria khusus yang diterapkan misal melalui rekomendasi dinas sosial setempat.
- b. Beasiswa PIP hendaknya dikelola oleh sekolah agar transparansi dana jelas dan tidak menimbulkan multipersepsi di masyarakat.
- c. Validasi data penerima KIP/PIP didasarkan data dari sistem dapodik.
- d. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antara pengelola PIP baik ditingkat pusat, provinsi, sekolah dan lembaga penyalur.

2. Sekolah

- a. Publikasi tentang informasi PIP lebih dioptimalkan.
- b. Pengawasan PIP secara internal perlu dilakukan untuk memantau distribusipenggunaan dana.
- c. Sekolah proaktif dengan pengaduan yang dilakukan oleh peserta didik.
- d. Sekolah hendaknya melakukan kerja sama dengan lembaga di kelurahan terkait KIP dalam rangka validasi data.